**TINJAUAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN INDIVIDU
TERHADAP KELUARGA SIMPATISAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA* YANG BERADA DI WILAYAH KONFLIK BERDASARKAN
HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

***Oleh:* Desi Natalia Sihombing**

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, S.H., L.L.M

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jalan Sumatera No. 06, Pekanbaru

Email / Telepon : desinataliaas51299@gmail.com / 082382969869

ABSTRACT

A person's citizenship status is so important, the international community makes several legal instruments that related to citizenship status. As stipulated in the Universal Declaration of Human Rights 1948, International Convention on Civil and Political Rights 1966, Convention on the Rights of the child 1989, International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, International Convention relating to the Status of Stateless Person 1954 and International Convention on Reduction of Statelessness 1961. The right to renounce nationality was based on the principle that a person has the right to exercise his nationality, the reasonable requirements of the laws by involved of the country.

This research will be structured by using the type of normative juridical research, that research was focused on examining the application of rules or norms in law to legal principles and theories which is carried out by conducting prior identification of a state policy on the citizenship status of ISIS sympathizer families. The data collection technique was used in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, that namely library law research.

In the results there are two main points that can be concluded. First, the rights of citizens who are reaffirmed, must be properly defended by the state or maintained by citizens, organized in countries regarding the citizenship status of ISIS sympathizer families. Two, based on positive law in Indonesia, there is no concrete accumulation that states that families of ISIS sympathizers are eligible to have their citizenship revoked.

Keywords: Citizenship - ISIS - Policy - International of human rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kewarganegaraan sangat penting dalam hukum internasional yang bersifat tradisional untuk menjelaskan hubungan antar manusia yang tidak memiliki kedudukan dalam hukum internasional dan negara, yang merupakan bahasan penting dalam hukum.¹ Begitu penting status kewarganegaraan seseorang maka masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan status kewarganegaraan.² Dalam Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 bahwa: “Setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraan secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.”

Dalam Pasal 24 ayat 3 *International Convention on Civil and Political Rights* 1966, juga mengatur mengenai hak kewarganegaraan yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Selanjutnya Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* 1989 berbunyi: “Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.”, dan juga terdapat didalam Pasal 9

¹ Philip C. Jessup, *A Modern of Nation : Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 89.

² Rahmawati Novia Sigit, “Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingnya Di Myanmar)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2018, hlm. 3.

International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women 1979. Pengakuan terhadap kewarganegaraan ini juga terdapat didalam *International Convention relating to the Status of Stateless Person* 1954 dan *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961.³

Awal tahun 2014, muncul entitas baru yang mengancam stabilitas keamanan dunia dengan mendeklarasikan diri sebagai negara. ISI (*Islamic State of Iraq*) yang telah bertransformasi menjadi ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) kembali mengalihkan fokus ke Irak.⁴ Tindakan radikal ISIS dianggap bukan hanya merupakan gerakan makar dan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Membahas *belligerent*, hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Hukum yang berlaku terhadap peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional negara yang bersangkutan.⁵

Pada tahun 2015 hingga 2017 ISIS berhasil menghimpun anggota dari berbagai wilayah dunia. Tercatat sebanyak 8.717 anggota berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet, 7.054 Timur tengah, 5.718 Eropa Barat, 5.319 Kawasan Arab Maghrib, 1.568 Asia Selatan dan Asia Tenggara, 845 Eropa bagian Tenggara, 439

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 90.

⁴ Michael Weiss & Hasan Hasan, *ISIS The Inside Story*, Jakarta Prenada media grup, 2015, hlm. 231.

⁵ Dian Purwaningrum Soemitro, “Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum, SELISIK*-Vol 2, No. 2 Januari 2016, hlm. 136.

Amerika Utara.⁶ Kekuatan ISIS yang tidak dapat dianggap remeh memancing gerakan operasi pembalasan dari negara untuk menjatuhkan pergerakan ISIS.⁷ Pada akhir 2019, Abu Bakar al-Baghdadi dikabarkan tewas, setelah dilakukannya operasi penyerbuan oleh Amerika Serikat. Sebagai tokoh sentral dalam kelompok ISIS, kematian Abu Bakar al-Baghdadi tentu akan membawa beberapa implikasi.⁸ Kematian Baghdadi akan menyebabkan kemunduran ISIS selama berbulan-bulan, atau tahunan.

Tercatat sekitar 20.000 sampai 30.000 pendukung ISIS berada di Suriah dan pasca kekalahan ISIS di Suriah sebagian besar dari mereka menjadi imigran ilegal dan berusaha kembali ke negaranya masing-masing. Meskipun secara teritorial sudah dinyatakan kalah, namun secara ideologi, ISIS masih memiliki potensi kerawanan. Dari 20.000 dan 30.000 simpatisan ISIS terdapat beberapa WNI yang memiliki keinginan untuk kembali ke Tanah Air. Setelah kekalahan terhitung ada sekitar 70.000 simpatisan eks ISIS yang dikumpulkan di kamp pengungsian Al-Hol Suriah. Semenjak kekalahan kelompok kekhilafahan ISIS, keluarga para petempur ISIS,

para perempuan dan anak-anak ditempatkan di kamp pengungsian yang dipadati lebih dari 70.000 orang.⁹

Kapasitas judicial menjadi konteks penting dalam isu ini karena pemerintah perlu memastikan proses hukum yang adil. Opsi kebijakan dari berbagai negara bermunculan salah satunya adalah memulangkan atau tidak memulangkan mantan simpatisan ISIS beserta keluarganya. Sebanyak enam belas negara mengeluarkan kebijakan untuk tidak memulangkan mantan simpatisan ISIS seperti, Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Mesir, India, Indonesia, Kazasthan, Kuwait, Makedonia, Libya, Pakistan, Serbia, Srilanka, Trinidad dan Turki, Australia. Sedangkan sebanyak lima negara telah memulangkan mantan simpatisan ISIS seperti, Prancis, Belgia, Denmark, Swedia dan Jerman. Serta empat negara lainnya memilih kebijakan untuk memulangkan simpatisan ISIS dengan syarat seperti, Rusia, Malaysia, Uzbekistan dan, Kosovo.¹⁰

Sejauh ini, Jerman menjadi salah satu negara yang memilih memulangkan warga negaranya. Setidaknya sudah 100 orang dipulangkan dari kamp pengungsian di Suriah pada Februari lalu. Juni tahun lalu, Jerman juga memulangkan 4 anak-anak dari pengungsian di Suriah.

⁶ Richard Barret, "Beyond The Caliphate Foreign Fighters and The Threat Of Returnees", *The Soufan Center*, Oktober 2017, hal. 11.

⁷ Dian Purwaningrum Soemitro, "Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum, SELISIK-Volume*, Nomor, Januari 01, hlm. 149.

⁸ Stanislaus Riyanta, "Dampak Kematian Abu Bakar al-Baghdadi terhadap Ancaman Terorisme di Indonesia", *Jurnalintelejent.net, Verba Volant Scripta Manent*, 28 Oktober 2019, hlm. 3.

⁹ Farhan Arif Sumawiharja & Adis Imam Ismunandar, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship former ISIS in Suriah)" *Jurnal Keamanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia*, Volume VI, No. 1, Mei 2020, hlm.102.

¹⁰ Tim Narasi, "Menangkis ISIS Istana Vs Komnas HAM Soal Polemik ISIS", *Narasi.Tv*, Rabu 12 Februari 2020.

Sedangkan Australia menganggap negara perlu melindungi warganya dan tetap menjaga jarak dari *returnees* ini. Namun Australia telah memulangkan 8 anak dari pengungsian pada Juni 2019.¹¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak memulangkan simpatisan ISIS, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat ada 500 warga negara Indonesia yang masih berada di Suriah hingga saat ini. Mereka merupakan para kombatan dan keluarganya yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sekitar 200 orang di antaranya adalah wanita dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsian Al-Hawl, Suriah. Adapun para pria ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF).¹²

Sebagai entitas internasional, ISIS acapkali meninggalkan kesan ancaman radikalisme bagi suatu negara asal. Dalam Konvensi 1961, pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Berkaitan dengan hal ini, konvensi ini tidak memberikan penjelasan mengenai status kewarganegaraan bagi keluarga simpatisan ISIS yang berada di daerah kekuasaan ISIS. Sehingga kebijakan pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan beberapa negara masih akan menjadi perdebatan.¹³

Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang, status

kewarganegaraan individu terhadap keluarga simpatisan ISIS yang berada di wilayah konflik berdasarkan HAM Internasional dengan menganalisis pertimbangan pencabutan warga negara oleh negara dalam kaitannya terhadap HAM Internasional dan menganalisis kebijakan Indonesia terhadap status kewarganegaraan keluarga simpatisan ISIS yang berada di wilayah konflik berdasarkan hukum positif dalam kaitannya terhadap HAM Internasional. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Individu Terhadap Keluarga Simpatisan Islamic States Of Irac and Syria yang Berada di Wilayah Konflik Berdasarkan Hak Asasi Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hak kewarganegaraan individu terhadap keluarga simpatisan *Islamic State Of Irac and Syria* yang berada di wilayah konflik berdasarkan hak asasi internasional ?
2. Bagaimanakah status hak kewarganegaraan individu warga negara Indonesia terhadap keluarga simpatisan *Islamic State Of Irac and Syria* berdasarkan hukum positif Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya status kewarganegaraan (*citizenship*) individu terhadap keluarga simpatisan *Islamic States Irac and Syria* yang berada

¹¹ Rizka Nurul, “Adakah Harapan Kepulangan WNI Simpatisan ISIS?”, *ruangngobrol.id*, 5 Juli 2020.

¹² Hussein Abri Dongoran, “Pemerintah Kaji Pemulangan WNI-Pro ISIS dari Suriah” *Koran Tempo*, Selasa 18 Juni 2019.

¹³ *Ibid.*

di daerah konflik berdasarkan hak asasi manusia internasional.

- b. Diketuinya status kewarganegaraan warga negara Indonesia terhadap keluarga simpatisan *Islamic States of Irac and Syria* berdasarkan hukum positif Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (*Rights to Have Rights*)

Dalam buku yang berjudul "*The Origins of Totalitarianism*" yang dilatabelakangi oleh berakhirnya Perang Dunia II, Arendt menggambarkan tentang horor yang ditimbulkan oleh *totalitarianism* yang berujung terhadap Holocaust. Arendt berusaha untuk mengelaborasi hubungan antara peristiwa tersebut terhadap fenomena timbulnya gelombang pengungsi dan *stateless person*. Hannah Arendt berpandangan bahwa hak untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas merupakan "*rights to have rights*" yaitu hak untuk memperoleh hak-hak.¹⁴

Hak untuk memperoleh hak tercantum pula dalam bukunya yang berjudul "*Imperialism*" Hannah Arendt

berpendapat, bahwa:¹⁵ "Kami menjadi sadar akan adanya hak untuk memiliki dan hak untuk menjadi bagian dari beberapa komunitas terorganisir, hanya ketika muncul jutaan orang yang telah kehilangan dan bisa tidak mendapatkan kembali hak-hak ini karena situasi politik global yang baru." Menurut Arendt pengakuan adalah yang pertama dan terutama pengakuan atas "keanggotaan," pengakuan bahwa seseorang "milik" dari beberapa komunitas manusia yang terorganisir. Status seseorang sebagai orang yang memegang hak bergantung pada pengakuan keanggotaannya.¹⁶

2. Teori Kewarganegaraan Liberal Modern (*Social Modern Citizenship*)

Teori kewarganegaraan liberal modern didukung oleh T.H. Marshall dalam karyanya yang berjudul *Citizenship and Social Class*, Marshall memberikan dua pemahaman mengenai kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan merupakan status yang melekat pada komunitas dan kedua, kewarganegaraan merupakan suatu status dimana anggotanya mempunyai hak dan kewajiban. Setiap masyarakat akan menghadirkan hak dan kewajiban yang berbeda pula bagi warganya.¹⁷ Warga dalam

¹⁴ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, 2nd ed., Meridian Books, New York, 1958, hlm. 177.

¹⁵ Seyla Benhabib, "Hannah Arendt and Rights to Have Rights" *Forum Hannover Germany*, 16 Oktober 1999, hlm. 5.

¹⁶ Seyla Benhabib, "Hannah Arendt on the contradictions of the nation-state", *Journal of Yale University*, Conniticut, Cambridge University Press, September 2012, hlm. 57.

¹⁷ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hlm. 10.

konsepsi T.H. Marshall adalah, setiap anggota dari suatu komunitas politik yang berkedudukan setara dan menikmati tiga hak yang diproteksi dan dijamin oleh negara, yaitu hak sipil, politik, dan hak sosial.¹⁸ Hak akan memiliki makna pada konteks institusional dan hanya akan dapat dicapai pada kondisi material. Marshall menambahkan bahwa perkembangan kewarganegaraan bukanlah hasil dari perkembangan negara. perubahan pada kewarganegaraan dapat dicapai melalui konflik antara institusi sosial dan antara kelompok sosial.¹⁹

Dalam teori ini, warga negara sering kali diartikan sebagai anggota masyarakat hukum yang bebas bertindak menurut hukum dan bebas meminta perlindungan hukum, artinya kewarganegaraan biasanya menekankan kewarganegaraan sebagai status hukum. Salah satu konsepsi kewarganegaraan liberal yang sering diartikulasikan oleh T. H Marshall, yang mengidentifikasi perluasan kewarganegaraan dengan perluasan hak dari sipil ke politik dan ke hak sosial dan ekonomi. Dia berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah masalah memastikan setiap orang sebagai anggota masyarakat yang penuh dan

setara, dan tujuan ini dapat dicapai oleh warga negara dengan semakin banyaknya hak-hak sipil.²⁰ Dalam konteks hak-hak sosial, teori kewarganegaraan liberal modern yang baru menganggap pemenuhan dasar hak-hak dan kebebasan sipil dan berpendapat bahwa, hak-hak dan kebebasan sipil pada prinsipnya menyiratkan dan membutuhkan hak-hak sosial, dan tidak bertentangan dengan negara.²¹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis secara linguistik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah gagasan guna meneliti struktur gagasan tersebut secara mendalam.²²
2. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara.²³
3. Warga Negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan konstitusi negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada diluar negeri, selama yang bersangkutan tidak

²⁰ Xiran Zheng, "Liberal Citizenship, Republican Citizenship, and Environmental Challenges", *Tesis*, Bachelor and Master Theses Leiden University, MATHesis Philosophy, 2019, hlm. 9.

²¹ https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/198134/7/07_chapter%202.pdf, Judith Sklar, *Theoretical Conceptions of Citizenship An Exploration*, Chapter 2, hlm. 39, diakses, tanggal, 31 Juli 2020.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007. Hlm. 45.

²³ Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.181.

¹⁸ Robertus Robert, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben*, Gajah Hidup, Serpong Tangerang Selatan, 2017, hlm. 81.

¹⁹ T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class and Other Essays*, The Syndics Of The Cambridge University Press, London Office: Bentley House, N.W. I American Branch, New York, 1950, hlm. 24.

memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum Internasional.²⁴

4. *Stateless Persons* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan.²⁵
5. ISIS (*Islamic States of Irac and Syria*) adalah hasil dari tren globalisasi Islam yang lebih luas yang menekankan ketegangan antara religiusitas dan modernitas, yang diperparah dengan peningkatan militansi Islam.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap aturan hukum internasional, pendekatan terhadap kasus dan pendekatan analitik. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan analisis hasil rincian kasus terhadap fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang analisis yuridis terhadap status kewarganegaraan terhadap keluarga simpatisan ISIS (*Islamic States of Irac and*

Syria) berdasarkan hak asasi manusia internasional.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat²⁷ dan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948;
- 3) *International Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954;
- 4) *International Convention of Reduction of Statelessness* 1961;
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-

²⁴ Umar Djani Martasuta, "Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Warga Negara", *Jurnal Fisip UPI*, 2010, Dikwar 1.

²⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59517/Chapter%20II.pdf> hlm. 38, diakses, tanggal, 21 Januari 2021

²⁶ The Hague Centre for Strategic Studies, *The Rise and Fall of ISIS: From Evitability to Inevitability Volatility and Friction in the Age of Disintermediation*, HCSS Strat Mon Annual Report 2016/2017, hlm. 3.

²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 138.

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kajian Kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM. Istilah satu dengan lainnya masing-masing analog, sehingga menggunakan salah satu diantaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah dimaksudkan adalah sebagai berikut, *Human Rights*, *Natural Rights*, *Fundamental Rights*, *Civil Rights*, Hak-hak Asasi

Manusia, Hak Kodrati.³⁰ Hak asasi manusia, *Droits De l'Homme* (Prancis), *Derechos Humanos* (Spanyol), *Menschenrechte* (Belanda), atau hak manusia secara harfiah adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah manusia.³¹

2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dilihat dari tiga kategori utama, yaitu:³²

- Hak sipil dan politik;
- Hak sosial ekonomi dan budaya;
- Hak Solidaritas.

3. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Tiga dari instrumen internasional terpenting yang berkaitan dengan hak asasi manusia secara kolektif dikenal sebagai *International Bill of Human Rights: Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Deklarasi Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya.³³

³⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 15.

³¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory and Practice*, Cornell university press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7.

³² Foster Steven, *The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights (Politics Study Guides)*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006, hlm. 29.

³³ USCIS, *Op.cit.*

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

²⁹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan

1. Konsep Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan adalah konsep yang kompleks: ia tidak memiliki penjelasan yang pasti, tetapi bagaimanapun ia merupakan kategori yang sangat penting dalam dunia kontemporer. Kewarganegaraan mencakup perlindungan hak-hak seseorang baik di dalam maupun di luar negeri. Ini memerlukan dimensi hukum, politik dan sosial: status hukum sebagai anggota masyarakat penuh, pengakuan atas status tersebut oleh sesama warga negara dan bertindak sebagai anggota masyarakat.³⁴

2. Makna dan Arti Penting Kewarganegaraan

Kewarganegaraan aktif mendasari klaim untuk setiap tingkat pemerintahan atas legitimasi, hak untuk membuat keputusan demi kebaikan bersama. Keputusan politik yang sah yang ditegakkan sendiri karena dianggap benar, menjadi dasar ketertiban.³⁵

3. Syarat Kehilangan Kewarganegaraan

Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan, apabila terbukti melakukan kejahatan internasional, penjahat perang, dan teroris adalah contoh dari kejahatan yang akui

³⁴ Veera Ilona Ija, "An Analysis Of The Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions", *Master's Thesis*, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences Social and Moral Philosophy, 2011, hlm. 2.

³⁵ Veera Ilona Ija, *Op.Cit*, hlm. 8.

dunia sebagai kejahatan internasional

C. Tinjauan Umum Tentang *Islamic State of Iraq and Syria*

1. Sejarah Berdirinya *Islamic State of Iraq and Syria*

ISIS dengan dinamika yang menyebabkan pada perubahan-perubahan nama dari ISIS tersebut.³⁶

- Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad (1999-2004)
- Al-Qaeda Irak(AQI) (2004-2006)
- Mujahidin Shura Council (2006)
- Islamic State of Irak* (ISI) (2006-2013)
- Islamic State of Irakand Syam* (ISIS)/ *Islamic State of Irakand Levant* (ISIL) (2013-2014)
- Islamic State* (IS) (2014-2019)

2. Struktur Keanggotaan *Islamic State of Iraq and Syria*

Terdiri dari Amirul Mukmin: Abu Bakar Al-Bagdadi. Dewan militer: Abu Ahmad Al-Alwani Waled Gasim Mohammad.Dewan Syariat: Syaikh Abu Mohammad Al-ÔAni yang bertugas membangkitkan semangat kombatan yang membawahi dua cabang yaitu pertama lembaga peradilan dan penegakan hukum syariat, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Dan kedua Bidang dakwah, rekrutmen, dan monitoring media. Dewan Syura: Abu Arkan Al-ÔAmiri,

³⁶ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5043/BAB%20II%20%2815-48%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses, tanggal, 11 Februari 2021.

yang bertugas merekomendasikan pimpinan ISIS di daerah dan anggota dewan militer. Dewan Keamanan dan Intelijen: Abu Ali Al-Anbari, yang merupakan mantan perwira intelijen di era Saddam Husein. Dewan Komunikasi dan monitoring media: Abu Al-Atsir Amru Al-Ôabsi dari Arab Saudi, bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi situs-situs jihad di berbagai negara.³⁷

3. *Islamic State of Iraq and Syria* Sebagai Kelompok Teroris

ISIS merupakan gerakan terorisme baru. ISIS merupakan model baru gerakan terorisme yang memiliki strategi, nilai, dan adat yang unik sehingga mampu memberikan keunggulan dibandingkan organisasi lain.³⁸

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Status Kewarganegaraan Individu Bagi Keluarga Simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria* Yang Berada Di Wilayah Konflik Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional

Sebanyak 25 negara memberikan kelanjutan kebijakan setelah runtuhnya kekuatan ISIS. Sebanyak 18 negara memilih

untuk membawa pulang perempuan dan anak-anak yang berada di daerah konflik diantaranya, Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Prancis, Belgia, Rusia, Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Australia, Norwegia, Malaysia, Turki, Turki, Albania, Makedonia, Azerbaijan, Kazakhstan dengan pertimbangan kemanusiaan dan tuntutan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Sebanyak 7 negara lainnya memilih untuk tidak membawa pulang dan mencabut kewarganegaraan perempuan dan anak-anak yang berada di daerah konflik dengan pertimbangan kepulauan tersebut akan mengancam keamanan negara. Diantaranya, Trinidad, Tobago, Tunisia, Inggris, India, Bulgaria, Denmark, dan Indonesia.

Berkenaan dengan pertimbangan negara terhadap kebijakan pencabutan kewarganegaraan seseorang terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan anggota keluarga dari simpatisan ISIS didasarkan pada pertimbangan akan terjadinya ancaman keamanan nasional. Pertimbangan ini akan sah dilakukan apabila memiliki ketentuan hukum positif yang jelas. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961

Apabila kewarganegaraan adalah legasi terhadap hak untuk mendapatkan hak maka, orang tersebut harus memiliki kewajiban yang telah diatur oleh negara. Kewarganegaraan perempuan dan anak yang berada di daerah konflik dapat dicabut apabila terbukti melanggar kewajiban

³⁷ Josh Levs and Holly Yan, "Western allies reject ISIS leader's threats against their civilians", *CNN World*, Selasa 23 September 2014.

³⁸ <http://repository.unair.ac.id/98589/3/3.%20B%20I%20Pendahuluan.>, diakses, tanggal, 26 Desember 2020.

yang diatur oleh negara dan atau telah terbukti mengancam keamanan nasional sesuai dengan peraturan. Penolakan terhadap kewarganegaraan hanya akan berlaku apabila warga negara terbukti telah melakukan pertentangan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 13 dan 14 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yaitu, menyatakan pindah kewarganegaraan dan melakukan tindak pidana non-politik.

Secara spesifik, kewarganegaraan sebagai hak untuk mendapatkan hak adalah bentuk hubungan antara HAM dan *Statelessness*. Penyelesaian terhadap hal tersebut, dilakukan melalui tiga proses, yakni *preemptive remedies*, *minimization remedies* dan *naturalizing remedies*.³⁹ Terkait dengan penafsiran mengenai stateless persons menurut Pasal 13 dan 14 Dalam *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 tidak boleh lebih menghasilkan pengurangan ketiadaan warga negara yang mungkin dimuat dalam Undang-Undang negara peserta mana pun sekarang ataupun selanjutnya berlaku. Kemudian menegaskan bahwa, apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lain, akan diajukan ke Mahkamah Pengadilan Internasional atas permintaan salah satu pihak yang terlibat.

³⁹ David Wissbroadt dan Clay Collins, *The Human Rights Of Stateless Persons*, Human Rights quarterly 28 no. 1, 2006, hlm. 271.

B. Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Terhadap Keluarga Simpatisan ISIS Yang Berada Di Wilayah Konflik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Penghilangan hak kewarganegaraan oleh suatu Negara merupakan tindakan yang tidak serta merta dilakukan begitu saja, prinsip perlindungan HAM menjadi hal yang sangat fundamental dalam mengambil keputusan tersebut. Karena HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanistis*), maka penghilangan kewarganegaraan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat dipahami sebagai tindakan pada ide individualisasi pidana. Serta dianutnya asas *culpabilitas* menjadi suatu konsep bahwa tidaklah manusiawi jika penjatuhan pidana diberikan terhadap orang yang tidak bersalah.⁴⁰ Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi ini telah menjadi idiom hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia harus diberi garis bawah yang bersifat kritis, yakni ada kata hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemilikinya.⁴¹

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan" Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, hal 56-58.

⁴¹ Ujang Chandra, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 204

WNI yang diduga memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diketahui oleh pimpinan instansi tingkat pusat, maka berkoordinasi dengan menteri, jika yang mengetahui pimpinan tingkat daerah, maka melaporkannya ke pejabat, dan jika yang mengetahui masyarakat sipil (yang bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia), maka melaporkannya kepada perwakilan (kedutaan) Indonesia dinegara tersebut.⁴²

Perlunya klarifikasi langsung oleh menteri kepada pihak yang terlapor, menjadikannya sebagai satu hambatan dalam pelaksanaan penghilangan kewarganegaraan tersebut. tidaklah mudah bagi menteri (yang mewakili) untuk bertemu langsung ataupun menghubunginya melalui telepon dengan pihak terlapor. Maka perlu adanya penyederhanaan tata-cara klarifikasi tersebut, bisa saja pembuktian kebenaran atas laporan itu cukup diklarifikasi kepada pelapor dan perwakilan (kedutaan) Indonesia di Suriah.⁴³

⁴² Samsul Arifin, "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS", *Jurnal Widya Yuridika*, Volume 3 Nomor 1, 2020 hlm. 75.

⁴³ *Ibid.*

Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan hak asasi manusia atau human rights, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens rights* atau biasa juga disebut dengan *the citizen cinitutiobal rights*. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan hak konstitusional atau hak yang berlaku hanya untuk warga negara. Apabila kewarganegaraan adalah legasi terhadap hak untuk mendapatkan hak maka, orang tersebut harus memiliki status kewarganegaraan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁴⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status kewarganegaraan individu terhadap keluarga simpatisan *Islamic States Irac and Syria* yang berada di daerah konflik menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan prinsip internasional hak-hak warga negara yang ditegaskan kembali, harus dipertahankan dengan baik oleh negara atau dipertahankan oleh warga negara, diorganisir dalam negara-negara mengenai status kewarganegaraan yang dimiliki oleh keluarga simpatisan ISIS. Pertimbangan negara terhadap kebijakan pencabutan kewarganegaraan anggota keluarga dari simpatisan ISIS

⁴⁴ Marshall, *Loc.cit.*

didasarkan pada dua alasan yaitu, ancaman keamanan nasional dan ketentuan hukum positif yang sah. Secara spesifik, kewarganegaraan sebagai hak untuk mendapatkan hak adalah bentuk hubungan antara HAM dan Statelessness.

2. Status kewarganegaraan individu terhadap keluarga simpatisan *Islamic States Irac and Syria* yang berada di daerah konflik menurut hukum positif dalam analisis yang dilakukan terhadap unsur-unsur hukum positif Indonesia tidak ditemukan akumulasi konkrit yang menyatakan bahwa keluarga simpatisan ISIS memenuhi syarat untuk dicabut kewarganegaraanya. Pertimbangan data WNI yang masih belum terklarifikasi dan ancaman kemandirian nasional akibat dari identifikasi ideologi yang belum terklarifikasi.

B. Saran

1. Penegakan diserahkan pada negara, tunduk pada tinjauan oleh sebuah otoritas internasional, terlebih dahulu oleh pengadilan negara dan akhirnya oleh pengadilan yang lebih tinggi., sehingga tercipta prosedur administratif yang fleksibel dikembangkan. Instrumen HAM internasional harus memberikan ketentuan yang jelas mengenai tahapan perlindungan hak asasi internasional terhadap status kewarganegaraan seseorang.
2. Perlu adanya sinergisitas dari instansi-instansi yang terkait. Perlu adanya peran lembaga yang terkait, pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat instansi terkait lainnya seperti,

Komisis Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Intelejen Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Nasional. Selanjutnya peran lembaga legislatif dalam meramu substansi hukum nasional yang bersinergi terhadap peraturan internasional terkait dengan penyederhanaan tata-cara klarifikasi terhadap WNI. Agar proses pencabutan WNI dilakukan sesuai dengan keadilan hukum yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arendt, Hannah, 1958, *The Origins of Totalitarianism*, 2nd ed., Meridian Books, New York.
- Barret, Richard, 2014, "The Islamic State " The Soufan Group, TSG, New York..
- Chandra, Ujang, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Collins, Clay, David Wissbroadt, 2006, *The Human Rights Of Stateless Persons*, Human Rights uarterly 28 no. 1.
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights In Theory and Practice*, Cornell university press, Ithaca and London.
- H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jessup, Philip C., 2012 *A Modern of Nation : Pengantar Hukum Modern Antar*

- Bangsa, Nuansa Cendekia*, Bandung.
- Marshall T.H., 1950, *Citizenship and Social Class and Other Essays*, The Syndics Of The Cambridge University Press, London Office: Bentley House, N.W. I American Branch, New York.
- Qamar, Nurul, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert, Robertus, 2017, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben*, Gajah Hidup, Serpong Tangerang Selatan.
- Starke, J.G., 2006, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab, Abdul Azis dan Umar, 2011, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung.
- Weiss, Michael & Hasan hasan, 2015, *ISIS The Inside Story*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Dian Purwaningrum Soemitro, 2001, “Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum SELISIK*, Volume, Nomor 01.
- Dian Purwaningrum Soemitro, 2016, “Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum*, SELISIK-Vol 2, No. 2.
- Farhan Arif Sumawiharja & Adis Imam Ismunandar, 2020, “Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship former ISIS in Suriah)” *Jurnal Keamanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia*, Volume VI, No. 1.
- Samsul Arifin, 2020, “Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS”, *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya,
- Seyla Benhabib, 1999, “Hannah Arendt and Rights to Have Rights” *Jurnal Forum*, Hannover Germany.
- Seyla Benhabib, 2012, “Hannah Arendt on the contradictions of the nation-state”, *Yale University Journal*, Conniticut, Cambridge University Press.
- Stanislaus Riyanta, 2019, “Dampak Kematian Abu Bakar al-Baghdadi terhadap Ancaman Terorisme di Indonesia”, *Jurnalintelejent.net*, Verba Volant Scripta Manent.
- Umar Djani Martasuta, 2010, “Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Warga Negara”, *Jurnal Dikwar 1*, Fisp UPI.
- USCIS: RAIO Directorate – Officer Training, 2019, “International Human Rights Law”, *U.S Citizenship and Imigration Service*.
- Veera Ilona Iija, 2011, “An Analysis Of The Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions”, *Tesis*, Master’s Thesis, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences Social and Moral Philosophy

Xiran Zheng, 2019, "Liberal Citizenship, Republican Citizenship, and Environmental Challenges", *Bachelor and Master Theses*, Leiden University, MATHesis Philosophy.

C. Surat Kabar/Majalah

Hussein Abri Dongoran, "Pemerintah Kaji Pemulangan WNI-Pro ISIS dari Suriah" *Koran Tempo*, Selasa 18 Juni 2019.

Josh Levs and Holly Yan, "Western allies reject ISIS leader's threats against their civilians", *CNN World*, Selasa 23 September 2014.

Rizka Nurul, "Adakah Harapan Kepulangan WNI Simpatisan ISIS?" *ruangngobrol.id*, 5 Juli 2020.

The Hague Centre for Strategic Studies, *The Rise and Fall of ISIS: From Evitability to Inevitability Volatility and Friction in the Age of Disintermediation*, HCSS Strat Mon Annual Report 2016/2017.

Tim Narasi, "Menangkis ISIS Istana Vs Komnas HAM Soal Polemik ISIS", *Narasi.Tv*, Rabu 12 Februari 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Perolehan

Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Website

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5043/BAB%20II%20%2815-48%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y> Diakses, tanggal, 11 Februari 2021

<http://repository.unair.ac.id/98589/3/3.%20BAB%20I%20Pendahuluan.pdf> Diakses, tanggal, 26 Desember 2020.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59517/Chapter%20II.pdf> Diakses, tanggal, 21 Januari 2021.

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/198134/7/07_chapter%202.pdf, Judith Sklar, Theoretical Conceptions of Citizenship An Exploration, Chapter 2, hlm. 39, diakses, tanggal, 31 Juli 2020.